

**PENATARAN P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) BAGI
MASYARAKAT DI KELURAHAN SAWUNGGALING KOTAMADYA SURABAYA
1981-1996**

DEWIRATNASARI

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : dewiratna.s1211@gmail.com

Septina Alrianingrum

S-1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

P-4 merupakan sebuah pedoman tentang penghayatan pengamalan Pancasila yang dibuat pada masa Orde Baru. P-4 dimasyarakatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia secara bertahap. Pemasyarakatan P-4 tersebut dilaksanakan melalui penataran yang disebut dengan Penataran P-4. P-4 ditatarkan untuk mengatasi berbagai bentuk permasalahan sosial yang terjadi dalam sebuah lingkungan masyarakat yang hidup dalam kota-kota besar, salah satunya adalah Kotamadya Surabaya. Dalam Penataran P-4 yang dilaksanakan di Seluruh Indonesia, Surabaya merupakan kotamadya dengan nilai tertinggi di Jawa Timur sebagai pelaksana Pemasyarakatan P-4 pada tahun 1989. Penataran P-4 tersebut dilaksanakan di setiap kelurahan. Kelurahan Sawunggaling merupakan salah satu Pelaksana P-4 Teladan di Kotamadya Surabaya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang (1) Bagaimana proses Penataran P-4 bagi masyarakat di Kelurahan Sawunggaling serta (2) Mengapa Kelurahan Sawunggaling menjadi Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan. Metode dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Heuristik (pengumpulan sumber) didapatkan peneliti di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya dan Badan Arsip Daerah Jawa Timur. Sumber berupa hasil wawancara dilakukan kepada warga masyarakat Kelurahan Sawunggaling yang ditatar pada masa tersebut. Kritik sumber dilakukan peneliti agar sumber yang didapatkan oleh peneliti dapat dijadikan sebagai sumber interpretasi data. Interpretasi data merupakan analisis serta sintesis sumber agar penulisan sejarah dapat dilaksanakan dengan baik. Historiografi merupakan metode akhir dalam penelitian, yakni dengan menuliskan hasil dari penelitian dalam bentuk tulisan.

Hasil penelitian ini adalah tentang proses serta alasan mengapa Kelurahan Sawunggaling terpilih sebagai Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan. Proses pelaksanaan Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling tuntas dilaksanakan selama 15 tahun (1981-1996). Pelaksanaan Penataran P-4 di kelurahan tersebut digunakan pola pendukung 17 jam serta 25 jam. Pada tahun 1996 Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling tuntas dilaksanakan bagi seluruh masyarakat usia dewasa. Pelaksanaan Penataran P-4 secara konsisten dan bertahap aktif diikuti oleh masyarakat, sehingga pada tahun 1989 Kelurahan Sawunggaling terpilih sebagai salah satu Pelaksana P-4 Teladan.

Kata Kunci: Penataran P-4, Kelurahan Sawunggaling, Masyarakat

Abstract

P-4 is a guideline on appreciating the practice of Pancasila made during the New Order period. P-4 is socialized to the whole Indonesian people gradually. Correctional P-4 is implemented through the upgrading called Upgrading P-4. P-4 is tackled to overcome various forms of social problems that occur in an environment of people living in big cities, one of which is the Municipality of Surabaya. In Upgrading P-4 implemented throughout Indonesia, Surabaya was the highest-ranking city in East Java as the P-4 Correctional Executor in 1989. The upgrading of P-4 was conducted in each kelurahan. Kelurahan Sawunggaling is one of Executing P-4 Exemplary in Surabaya Municipality.

The formulation of the problem in this research is about (1) How is the process of Upgrading P-4 for the community in Sawunggaling Sub-district and (2) Why Sawunggaling Urban Village becomes Executor of P-4 Teladan. Method in research used is method of research of history. Heuristic (source collection) was obtained by researchers at the Library and Archive Office of Surabaya City and East Java Regional Archives Board. Sources of interviews conducted to residents of Sawunggaling Urban Village who ditatar during the period. Criticism of the source conducted by researchers so that the source obtained by researchers can be used as a source of data interpretation. Interpretation of data is an analysis and synthesis of the source for the writing of history can be implemented properly. Historiography is the final method in research, namely by writing the results of research in the form of writing.

The result of this research is about the process and the reason why Sawunggaling Village was chosen as Executives Exemplary of P-4. The implementation process of Upgrading P-4 in Sawunggaling Sub-District was completed for 15 years (1981-1996). Implementation of Upgrading P-4 in the village used pattern support 17 hours and 25 hours.

In 1996 Upgrading of P-4 in Sawunggaling Sub-District was completed for all adult community. The implementation of P-4 Upgrading was consistently and gradually actively followed by the community, so that in 1989 Sawunggaling Village was chosen as one of the Executives Exemplary of P-4.

Keywords: *Upgrading P-4, Village Sawunggaling, Society*

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan prinsip/azas dasar dalam penyelenggaraan kenegaraan dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹ Jati diri sebuah bangsa dapat dilihat melalui sikap yang dibangun oleh masyarakat dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Persoalan dapat terselesaikan dengan baik tatkala prinsip yang dipegang ialah sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsanya sendiri. Pancasila merupakan suatu prinsip hidup yang dibangun dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila layak menjadi acuan dasar manusia Indonesia dalam menyelesaikan segala persoalan, dengan itu jati diri bangsa Indonesia tetap terjaga.

Dalam perkembangan negara, Indonesia pernah dipimpin oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Konsepsi tentang pemasyarakatan Pancasila melalui P-4 pada masa Orde baru oleh Presiden Soeharto sudah dikemukakan dalam pidato acara Dies Natalis Universitas Gajah Mada tahun 1974. Dalam pidato tersebut Presiden menjelaskan bahwa tidak diragukan lagi tentang kebenaran Pancasila adalah milik bangsa Indonesia. Namun Pancasila tidak cukup untuk dimiliki, melainkan harus pula dihayati dan diamalkan.

Pemerintahan masa Orde Baru mengusung sebuah cita-cita yaitu adanya pembangunan yang merata pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain pembangunan infrastruktur juga dilakukan pembangunan dalam bidang sosial dan budaya, yaitu dengan melaksanakan berbagai bentuk penataran P-4 dalam masyarakat. Dengan demikian wawasan pembangunan nasional menjadi lebih luas dan tolok ukur keberhasilan pembangunan mempunyai daya jangkauan yang lebih meluas pula. Tolok ukur pembangunan nasional dengan demikian tidak terpusat pada besaran-besaran ekonomis semata tetapi sekaligus mencakup besaran-besaran sosial budaya.²

Pada tahun 1975 Presiden Soeharto kembali menyampaikan gagasan tentang P-4 melalui sambutan presiden dalam acara Dies Natalis Universitas Indonesia. Gagasan tentang pentingnya sebuah penghayatan serta pengamalan Pancasila disampaikan pula oleh presiden dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 1975. Dalam pidato tersebut, Presiden Soeharto menyampaikan bahwa tidak diragukan sedikitpun sebagai Dasar Negara Indonesia. Namun persoalan yang terjadi adalah bahwa perilaku dalam kehidupan sehari-hari manusia Indonesia secara umum belum mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila.³ Pada tahun berikutnya Presiden Soeharto juga kembali menyampaikan hal tersebut melalui sambutan presiden dalam acara Pembukaan Musyawarah Kerja

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Istana Negara. Dalam sambutan ini Presiden telah menyinggung tentang pengertian dari Eka Prasetya Pancakarsa. Eka Prasetya Pancakarsa merupakan sebuah janji yang disahkan oleh MPR bagi rakyat Indonesia untuk secara utuh dan dengan tekad yang bulat melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila dengan ke-36 butir nilai penjabarannya.

Gagasan tentang P-4 menjadi begitu serius digarap tatkala pada bulan Oktober 1977 Presiden Soeharto selaku mandataris MPR menyampaikan usulan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) yang disusun bersama dengan Panitia Sebelas. Panitia Sebelas ini sebelumnya telah dibentuk oleh presiden untuk merancang naskah pedoman tersebut. Kemudian Badan Pekerja MPR membentuk panitia Ad Hoc untuk menyusun Tap MPR. Dalam sebuah Sidang Umum MPR pada tanggal 11 Maret hingga 23 Maret 1978 pada akhirnya ditetapkan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa).

Pada penelitian sejarah diperlukan suatu batasan masalah agar tidak terjadi penyimpangan topik dari permasalahan yang ditemukan. Pada penelitian ini batasan yang ditentukan oleh peneliti ialah Penataran P-4 yang dilaksanakan kepada para warga masyarakat di Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya. Hal ini dikarenakan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo merupakan salah satu Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan dari empat kelurahan awal yang menjadi kelurahan teladan untuk penataran P-4 di Kotamadya Surabaya. Hal ini menjadi suatu daya tarik sendiri bagi peneliti untuk membahas mengenai penataran bagi warga masyarakat Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo. Pemilihan kecamatan Wonokromo disebabkan oleh data awal yang ditemukan oleh peneliti adalah bahwa Kecamatan Wonokromo merupakan kecamatan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup baik. Partisipasi masyarakat melalui swadaya, swakarsa dan swakarya yang baik dalam bidang pembangunan desa atau kelurahan terlihat di Kecamatan Wonokromo. Dimensi spasial dipilih guna menghindari perluasan objek kajian. Penelitian ini pada akhirnya nanti akan disebut sebagai penulisan sejarah lokal.

Dimensi temporal yang memberikan batas pada penelitian ini adalah pada masa Orde Baru tepatnya pada tahun 1981-1996. Pada tahun 1981 merupakan tahun dimana BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dibentuk di Kotamadya Surabaya. Badan inilah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemasyarakatan P-4 di Kotamadya Surabaya. Kemudian batasan tahun 1996 ialah

¹ Abdul Rouf Tayip dan Wicaksono, 1996, *Pedoman Penghayatan dan Pegamalan Pancasila (P-4) Suatu Tinjauan Singkat*, Surabaya: University Press IKIP Surabaya, hlm. 9.

² Jujun S. Suriasumantri, dkk, 2002, *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 46.

³ *Loc. Cit*

didasarkan pada Surat resmi dari BP-7 Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya kepada BP-7 Daerah Tingkat I bahwa pemasyarakatan P-4 di Kotamadya Surabaya sudah dinyatakan tuntas dengan persyaratan yang telah dipenuhi. Dimensi spasial dan temporal digunakan peneliti untuk mempermudah proses penelitian sejarah yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang itulah peneliti mengangkat judul "Penataran P-4 (Pedoann Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) bagi Masyarakat di Kelurahan Sawunggaling Kotamadya Surabaya, 1981-1996". Rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimanakah proses penataran P-4 bagi masyarakat di Kelurahan Sawunggaling tahun 1981-1996?
2. Mengapa Kelurahan Sawunggaling dipilih sebagai Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan di Kotamadya Surabaya?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui proses penataran P-4 bagi masyarakat di Kelurahan Sawunggaling Kotamadya Surabaya tahun 1981-1996
2. Menganalisis alasan Kelurahan Sawunggaling dipilih sebagai Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan di Kotamadya Surabaya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam mengkaji banir di Tulungagung ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah sekumpulan ketentuan dan aturan sistematika guna memudahkan dalam usaha pengumpulan sumber, penilaian kritik, dan menyajikannya yang biasa dalam bentuk tulisan.⁴ Metode sejarah memiliki empat tahapan proses penelitian yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Pada tahap ini penelitian melakukan penelusuran sumber yang terkait dengan tema penelitian yaitu tentang Penataran P-4 di Kelurahan sawunggaling Kotamadya Surabaya.

Tahapan selanjutnya dalam sebuah metode penelitian adalah kritik sumber, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern menekankan pada originalitas sumber, keaslian sumber merupakan nilai penting dalam melakukan kritik terhadap sumber. Dalam hal ini kritik ekstern digunakan untuk menguji keaslian sumber terhadap Koran dan Arsip serta buku yang berkaitan dengan Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling Kotamadya Surabaya tahun 1981-1996. Sumber yang sudah diperoleh oleh peneliti setelah melalui tahap kritik sumber secara ekstern dinyatakan sebagai sumber asli. Arsip yang diperoleh dari Badan Arsip Jawa Timur masih digunakan pengetikan dengan mesin ketik. Sedangkan kritik intern menekankan pada kebenaran isi sumber.

Setelah dilakukan kritik terhadap sumber yang ditemukan, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan interpretasi. Interpretasi adalah proses menghubungkan antara fakta satu dengan fakta lainnya dengan melakukan analisis-sintesis. Interpretasi merupakan tahap dimana keahlian peneliti dalam menganalisis sumber serta

membuat sintesis baru sangat diperlukan. Fakta-fakta yang diperoleh dari sumber sejauh ini memberi gambaran bahwa Penataran P-4 bagi masyarakat Surabaya dilakukan oleh pemerintah selain untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Pancasila, juga dilakukan untuk membendung bahaya komunis. Selain itu, Surabaya sebagai Ibu kota Provinsi Jawa Timur yang dalam setiap aspeknya selalu dijadikan patokan bagita daerah-daerah lainnya di Jawa Timur.

Langkah keempat adalah historiografi. Pada tahap ini peneliti melakukan rekonstruksi peristiwa sejarah dengan menyusun fakta-fakta yang sudah dipilih secara kronologis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan

1. Tahun 1983-1987

Penataran P-4 oleh BP-7 dilaksanakan di setiap kelurahan dan lembaga-lembaga di Kotamadya Surabaya. Masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri maupun pegawai BUMN tidak ditatar di kelurahan lagi. Sebagai bukti telah ditatar, setiap peserta mendapatkan sertifikat/piagam Penataran P-4. Sementara itu masyarakat yang berprofesi sebagai PNS tidak ditatar kembali di Kelurahan Sawunggaling karena telah ditatar di kantor masing-masing. Para PNS yang bekerja di kantor dinas Kotamadya Surabaya ditatar oleh BP-7 serta para pimpinan masing-masing kantor. Para pimpinan kantor mendapatkan penataran dengan Tipe A, yang berhak mendapatkan sertifikat sebagai penatar P-4. BP-7 Kotamadya Surabaya bekerjasama dengan para pimpinan tersebut dalam melaksanakan Penataran P-4. Fungsi dari BP-7 dalam hal ini adalah melakukan fungsi pendidikan serta pengawasan kepada para Penatar sekaligus Petatar dalam proses pelaksanaan Penataran P-4. Dengan bukti sertifikat tersebut, para warga Sawunggaling yang telah ditatar di instansi masing-masing tidak ditatar kembali di kelurahan Sawunggaling.⁵

Penataran P-4 bagi masyarakat Kelurahan Sawunggaling pada tahun 1983 banyak diikuti kader PKK serta Karang Taruna. Pada tahun awal Penataran P-4 ini usia yang muda menjadi suatu hal yang penting. Para kader Karang Taruna dan kader PKK lebih banyak mendapatkan porsi dalam mengikuti Penataran P-4. Karang Taruna merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari pemuda dan pemudi yang dalam hal ini mereka dianggap sanggup mendapatkan materi dalam P-4. Sementara PKK merupakan kelompok masyarakat terdiri dari ibu-ibu yang dianggap berpengaruh dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Anggota Karang Taruna dijadikan tombak awal adanya Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling. Selain menjadi pelopor dalam masyarakat, Karang Taruna juga ditugaskan untuk membantu penyelenggaraan Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling seperti menyiapkan tempat penyelenggaraan Penataran P-4 dan mengatur absensi peserta. Kader Karang Taruna dan PKK yang ikut dalam penataran P-4 dipilih oleh Kepala RW masing-

⁴Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press. Hlm 10-11.

⁵ Hasil wawancara kepada Ismail, Suyono dan Ibu Ismaini selaku PNS di Kelurahan Sawunggaling pada tanggal 21 April 2018

masing. Dengan jumlah satu angkatan penataran P-4 adalah minimal 100 orang. Peserta penataran ialah terdiri dari satu kelurahan yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Sawunggaling.

Pada tahun 1983-1987 Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling dilaksanakan menggunakan pola pendukung 17 jam. Pola pendukung 17 jam tersebut merupakan pola pendukung yang berdurasi waktu pendek yang digunakan di Kotamadya Surabaya. Pola pendukung 17 jam diberikan kepada warga masyarakat. Dalam hal ini, kader PKK dan Karang Taruna merupakan warga masyarakat awal yang dijadikan petatar dari proses pelaksanaan Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling. Kader-kader terbaik dari petatar tersebut kemudian ditunjuk oleh pihak kelurahan untuk diikutkan dalam Penataran Calon Fasilitator di kantor Kecamatan Wonokromo.⁶

Pada periode awal dengan digunakan pola pendukung 17 jam, jumlah angkatan penataran P-4 di kelurahan Sawunggaling dalam 1 tahun dilaksanakan sebanyak 2 hingga tiga angkatan. Penataran tersebut dalam satu angkatan diikuti oleh 96 orang petatar yang dipilih dari kader PKK dan Karang Taruna tingkat RW. Pelaksanaan Penataran dijadikan dalam satu tempat yakni di SDN Sawunggaling 01. Pola 17 jam yang dilaksanakan dalam Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling berlangsung selama 5 hari. Pada tahun 1983 penataran dilaksanakan pada pagi hari dimulai dari jam 9 hingga jam 12 WIB di Kantor Kelurahan. Kemudian mulai pada tahun 1984 pelaksanaan Penataran P-4 diganti dari jam 6 sore hingga jam 8 malam.⁷ Peserta penataran mayoritas dipilih dari kader-kader PKK dan Karang Taruna. Pelaksanaan Penataran P-4 dihadiri oleh Kepala Kantor Kecamatan Wonokromo dan pihak berwenang BP-7 sebagai Penatar materi dalam P-4. Satu minggu pelaksanaan tersebut disebut sebagai satu angkatan Penataran P-4. Sementara Penataran P-4 yang dilaksanakan di Kelurahan Sawunggaling pada awal-awal periode penataran P-4 belum terlalu digencarkan. Pihak BP-7 melaksanakan Penataran P-4 bagi instansi-instansi di Kotamadya Surabaya.⁸

Pelaksanaan Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling pada tahun-tahun awal (1981-1987) dilaksanakan di kantor kelurahan atau tempat yang luas yang dapat meampung minimal 100 orang peserta. Pelaksanaan Penataran P-4 diikuti oleh kebanyakan dari para kader PKK dan Karang Taruna dengan cara dikumpulkan menjadi satu dalam satu tempat. Terdapat perwakilan dari berbagai RW. Total RW di Kelurahan Sawunggaling adalah 12 RW. Setiap RW tersebut dipilih kader terbaik untuk ikut dalam Penataran P-4 yang diselenggarakan oleh pihak Kelurahan Sawunggaling.

Mayoritas peserta penataran atau petatar merupakan para kader tokoh organisasi masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. Petatar tersebut mengikuti penataran P-4 atas dasar perintah dari Ketua RW masing-masing.⁹ Pada setiap RW yang diikutkan adalah para kader yang menjabat sebagai PKK dan Karang Taruna tingkat RW. Pelaksanaan penataran P-4 dilakukan secara bertahap oleh BP-7 di setiap kelurahan di seluruh Kotamadya Surabaya.

Materi yang diberikan pola 17 jam pada pelaksanaan Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling sesuai dengan yang ditetapkan dalam Inmendagri No. 31 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Penataran P-4 di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, Kotamadya Daerah Tingkat II, Kotamadya, dan Kota Administratif seluruh Indonesia. Dalam Inmendagri tersebut materi penataran terdiri dari P-4, GBHN, UUD 1945. Materi diberikan kepada peserta dengan digunakan metode ceramah dan metode diskusi sebagai bentuk dari proses pendalaman materi. Diskusi dilaksanakan antar kelompok, sehingga dalam proses pendalaman materi yang telah disampaikan, tiap peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni kelompok Nusa, Bangsa dan Bahasa.¹⁰

Dalam Penataran P-4 tidak hanya diberikan materi tentang P-4 dan diskusi kelompok. Disediakan waktu untuk dilakukan simulasi permainan P-4 pada 2 jam terakhir sebelum proses penutupan kegiatan. Permainan simulasi P-4 pada dasarnya tidak cukup dilaksanakan selama 2 jam untuk 100 orang peserta. Namun dalam pelaksanaan Penataran P-4 permainan simulasi hanya dijadikan contoh di depan selama waktu yang disediakan tersebut.

2. Tahun 1987-1991

Penataran bagi warga masyarakat dengan Pola 17 jam terakhir dilaksanakan di Kotamadya Surabaya pada tahun 1986. Pada tahun 1987 telah dilaksanakan penataran dengan pola 25 jam bagi warga masyarakat. Penataran dengan pola 25 jam pada awalnya hanya diberikan kepada para pemuka agama Kristen dan Budha serta karyawan di beberapa pabrik di wilayah Kotamadya Surabaya. Inmendagri No.9 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 jam serta SK Walikota Kotamadya No. 142 tahun 1987 dan SK Walikota Kotamadya No. 115 tahun 1988 dijadikan dasar dimulai Penataran P-4 bagi warga masyarakat yang mencakup tokoh masyarakat serta warga masyarakat umum termasuk PKK, Karang Taruna, Hansip, Tokoh agama warga biasa dan sebagainya dengan pola pendukung 25 jam.

Pelaksanaan Penataran P-4 bagi warga masyarakat dapat diterima dan diikuti dengan baik. Ketua RT setempat tidak diharuskan mengirim undangan secara tertulis untuk mengumpulkan masyarakat. Namun hanya digunakan

⁶ Hasil wawancara Kepada Ibu Sumarni selaku Kader PKK RW 01 tahun 1983 di Kelurahan Sawunggaling pada tanggal 18 April 2018.

⁷ Hasil Wawancara kepada Ibu Sumarni selaku Kader PKK RW dan Suwito selaku Karang Taruna RW 02 di Kelurahan sawunggaling pada tanggal 18 April 2018

⁸ Hasil wawancara Kepada Djoni Hendratno selaku Kepala Bidang Pendidikan BP-7 Tahun 1997 pada tanggal 25 april 2018

⁹ Hasil Wawancara kepada Sumarni selaku Kader PKK RW dan Suwito selaku Kader Karang Taruna RW 02 di Kelurahan sawunggaling pada tanggal 18 April 2018

¹⁰BP-7 Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, 1993, Mari Bermain Simulasi P-4, Surabaya: BP-7 Provinsi Jatim

komunikasi lisan dengan tatap muka. komunikasi antar masyarakat di Kelurahan sawunggaling dalam proses pelaksanaan Penataran P-4 dipermudah oleh masyarakat itu sendiri.¹¹

Penataran P4 di Kelurahan Sawunggaling pada periode ini dilaksanakan dengan pola pendukung yang lebih lama, yakni 25 jam. Pelaksanaan P-4 di Kelurahan Sawunggaling pada periode ini lebih gencar dilaksanakan bagi masyarakat. Pada tahun 1989 Kelurahan Sawunggaling merupakan kelurahan yang ditunjuk sebagai Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan. Syarat sebagai Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan yang dijelaskan pada memencakup beberapa aspek yang harus dimiliki oleh kelurahan tersebut. Diantaranya adalah meliputi kemandirian (Swasembada), kuantitas penataran, kualitas hasil penataran dalam lingkungan sosial masyarakat serta keberfungsian perangkat kelurahan dengan baik. Keempat syarat tersebut harus dipenuhi oleh Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan. Pada tahun 1989 Kelurahan Sawunggaling ditunjuk sebagai calon Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan oleh pemerintah Kotamadya Surabaya. Dengan demikian syarat tersebut segera dipenuhi oleh Kelurahan Sawunggaling dan pada tahun 1991 telah resmi menjadi Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan.¹²

Penunjukan sebagai Calon Pelaksana Kelurahan Teladan berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling. Ketua penyelenggara Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling adalah kepala Kelurahan Sawunggaling itu sendiri. Sistem yang ditetapkan pada penataran periode kedua ini adalah bahwa Penataran P-4 tidak dilaksanakan seperti pada periode sebelumnya dengan hanya diikuti oleh beberapa orang dari seluruh RW yang kemudian dijadikan satu dalam satu tempat.¹³ Penataran pada periode ini dilaksanakan di tempat yang berbeda dengan tujuan agar masyarakat usia dewasa yang berada di setiap RW dapat dijangkau dengan P-4. Tempat pelaksanaan penataran dipilih dengan yang kriteria mampu menampung peserta minimal 100 orang petatar. Penataran P-4 dilaksanakan di Balai RW 08, SDN Ciliwung, SMP Among Siswo, dan SDN Sawunggaling 1

Anggaran dana pelaksanaan Penataran P-4 di Kotamadya secara umum dilaksanakan berdasar pada Keppres No.10 Tahun 1979 dengan dana APBD, dana ganjaran dan dana swadaya dari masyarakat. dari ketiga sumber anggaran tersebut, dana swadaya dari masyarakat adalah terhitung yang paling jarang atau sedikit. Di Kelurahan Sawunggaling sendiri, pelaksanaan Penataran P-4 dengan digunakan dan swadaya masyarakat baru dilaksanakan tahun 1991 dalam usaha penuntasan 90% petatar sebagai pemenuhan syarat Pelaksana Kelurahan Teladan. Dana swadaya masyarakat tidak dikelola oleh BP-7 melainkan dikelola oleh organisasi setempat yakni PKK. Pada tahun 1991 tersebut pula Kelurahan Sawunggaling telah menjadi salah satu dari empat

Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan di Kotamadya Surabaya.

Ruang lingkup pelaksanaan Penataran P-4 pada periode ini dilaksanakan pada wilayah RW-RW tertentu. Beberapa RW yang lokasinya berdekatan dijadikan 1 dalam 1 tempat untuk melaksanakan Penataran P-4. Wilayah Kelurahan Sawunggaling yang memiliki 12 RW dibagi menjadi beberapa tempat pelaksanaan.¹⁴ Pelaksanaan penataran dengan pola 25 jam dilaksanakan selama 5 hari pada jam 5 sore hingga jam 8 malam. Waktu pelaksanaan dan durasi waktu serta lokasi merupakan kebijakan yang ditentukan oleh tim penyelenggara yakni Kelurahan Sawunggaling itu sendiri. Penataran P-4 pada periode ini dilaksanakan di 3 tempat di Kelurahan Sawunggaling dengan waktu yang berurutan. Penataran P-4 dapat dilaksanakan setiap triwulan sekali atau lebih di tempat yang berbeda secara bergantian. Dalam satu tahun dapat diperoleh hingga 3-5 angkatan Penataran P-4.

Petatar yang aktif pada periode ini adalah warga masyarakat biasa (mencakup tokoh masyarakat), PKK dan Karang Taruna. Petatar tersebut dipilih oleh ketua RT masing-masing. Ketentuan peserta yang ditetapkan adalah minimal berusia 17 tahun. Namun dalam pelaksanaan Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling terdapat petatar dengan usia 15 tahun yang tergabung dalam anggota Karang Taruna tingkat RT. Syarat petatar lain yang dipilih adalah memiliki kemampuan serta kecakapan dan pengaruh dalam masyarakat. Alasan yang mungkin dipilih oleh Ketua RT adalah karena pertimbangan hal tersebut. Petatar berusia 15 tahun namun memiliki kecakapan serta pengaruh yang baik dalam lingkungan masyarakat. Alasan lain yang mungkin juga adalah perihal adanya pemenuhan syarat Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan.

3. Tahun 1991-1996

Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan di Kotamadya Surabaya yang terpilih pada awal pencalonan diantaranya adalah Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Simkerto Kecamatan Simokerto, Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Patemon Kecamatan Sawahan. Empat kelurahan tersebut merupakan kelurahan yang untuk pertama kalinya menjadi Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan di Kotamadya Surabaya. Kelurahan yang telah ditunjuk tersebut terletak di tempat yang berbeda wilayah. Berdasar data BPS tahun 1989 Kelurahan Sawunggaling dan Patemon terletak di wilayah Surabaya Selatan, Kelurahan Manukan Wetan terletak di wilayah Surabaya Utara, Kelurahan Simokerto berada di wilayah Surabaya Timur.¹⁵

Kelurahan yang ditunjuk sebagai Pelaksana P-4 Teladan diharapkan mampu menjadi contoh bagi kelurahan-kelurahan di wilayahnya. Kelurahan yang dipilih merupakan kelurahan terbaik di setiap kawasan di Kotamadya Surabaya. Kelurahan yang dicalonkan pada

¹¹ Hasil wawancara dengan Djaiz P. Selaku Ketua RT 01 RW 02 tahun 1991 di Kelurahan Sawunggaling pada tanggal 22 April 2018

¹² Surat Walikota Kotamadya Surabaya kepada Camat Simokerto, Sawahan, Wookromo dan Tandes No.065 tahun 1989 perihal Desa Pelaksana P-4 Teladan

¹³ Hasil wawancara kepada Gatot, Ibu Endang dan Ibu Nanik selaku Karang Taruna RT tahun 1987-1989 di Kelurahan Sawunggaling pada tanggal 23 April 2018

¹⁴ Hasil wawancara kepada Suwito selaku Karang Taruna RW 02 di Kelurahan sawunggaling pada tanggal 18 April 2018

¹⁵ Tim Penyusun, 1990, *Op.Cit.*, hlm. 6

tahun 1989 tersebut, pada tahun 1991 telah resmi menjadi Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan. Surat Edaran Walikota Surabaya No.2991 Tahun 1991 perihal Pendirian Papan Nama Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan. Dalam lampiran dalam surat edaran tersebut, nama kelurahan yang ditulis dalam contoh gambar papan nama adalah Kelurahan Sawunggaling. Setiap Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan diwajibkan untuk memiliki papan nama di kelurahan masing-masing. Adanya papan tersebut selain sebagai sebuah tanda, juga diharapkan masyarakat dari kelurahan lain dapat mencontoh perilaku yang baik yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam kelurahan tersebut.

Sebagai Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan, Kelurahan Sawunggaling tidak begitu saja selesai dalam melaksanakan Penataran P-4. Pelaksanaan Penataran P-4 tetap dilaksanakan di kelurahan tersebut namun dengan jumlah angkatan yang lebih sedikit. Pada periode ini secara umum yang lebih digalakkan dalam Pemasarakatan P-4 adalah Permainan Simulasi P-4. Surat Walikota Surabaya No. 951 tahun 1991 kepada camat dan lurah di Kotamadya Surabaya dijejaskan tentang adanya permasalahan terkait Pemasarakatan P-4 serta solusi yang harus dilaksanakan. Terdapat beberapa kecamatan yang belum melaksanakan Pemasarakatan P-4 secara optimal. Dampaknya, jumlah petatar dalam kecamatan tersebut masih sangat sedikit. Sementara Surat Edaran Gubernur No. 20655 Tahun 1990 menegaskan bahwa pada akhir Pelita V (1993/1994) seluruh penduduk usia dewasa di Jawa Timur diharuskan sudah terjangkau oleh P-4.

Petatar yang aktif pada periode akhir adalah para lansia atau seseorang yang tidak mampu membaca dan menulis. Penataran diberikan kepada masyarakat tersebut disebabkan oleh adanya tanggung jawab atas Kelurahan Sawunggaling untuk bisa menjangkau seluruh penduduk usia dewasa. Tanggung jawab tersebut disebabkan oleh karena Kelurahan Sawunggaling merupakan Kelurahan Pelaksana Teladan yang harus dapat dijadikan teladan bagi kelurahan-kelurahan lain di Kotamadya Surabaya. Hal ini berakibat pada upaya penutasan yang dilakukan oleh tiap RW di Kelurahan Sawunggaling. Pemilihan petatar dilakukan oleh para RT di masing masing RW. Pada periode sebelumnya, petatar yang dipilih adalah anggota masyarakat yang memiliki kecakapan serta pengaruh dalam lingkungan masyarakat. Ketentuan tersebut sudah sesuai dengan perintah dari walikotamadya Surabaya. Akibatnya, anggota masyarakat yang buta huruf serta tidak berpengaruh banya dalam masyarakat belum terjangkau oleh P-4. Oleh karena itu pada periode akhir ini masyarakat yang belum terjangkau oleh P-4 tersebut ditatar P-4 atas usul dari RW yang bersangkutan.

Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling pada periode ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyempurnakan tanggung jawab sebagai Pelaksana P-4 Teladan. Warga masyarakat yang ditatar lebih dikhususkan bagi para masyarakat yang buta huruf. Pada tahun 1994, diadakan penataran P-4 kepada masyarakat

yang hanya berusia tua, yang tidak bisa membaca dan menulis. Di Kelurahan Sawunggaling ini diberikan kepada para para lansia (lanjut usia) yang tidak dapat membaca dengan pola 17 jam. Penataran P-4 pada periode ini didasarkan pada permintaan dari RW kepada pihak kelurahan yang kemudian akan ditindaklanjuti hingga ke BP-7 Kotamadya Surabaya.

Setelah dijadikan Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan pada tahun 1989 Kelurahan Sawunggaling memiliki tanggung jawab untuk selalu melaporkan hasil pemsarakatan P-4. Tahun 1996 warga masyarakat usia dewasa di Kelurahan sawunggaling dari RW 01 hingga RW 12 sudah seluruhnya terangkau oleh P-4. Total penduduk usia dewasa pada tahun 1996 adalah 17.515 jiwa. Sementara Penataran P-4 dapat dijangkau oleh 12.412 orang, selebihnya Pemasarakatan P-4 diberikan melalui Permainan Simulasi P-4. Prosesntase ketuntasan yang dapat dicapai oleh Kelurahan Sawunggaling dalam Pemasarakatan P-4 adalah adalah 93,43%.¹⁶ Parameter ketuntasan Pemasarakatan P-4 ditentukan oleh jumlah masyarakat yang telah ditatar dengan jumlah total penduduk usia dewasa. Minimal 1/3 masyarakat usia dewasa dalam suatu daerah harus sudah dapat terjangkau oleh P-4. Dengan demikian bersamaan dengan tuntasnya Pemasarakatan P-4 di Kotamadya Surabaya tahun 1996, Kelurahan Sawunggaling juga sudah tuntas dalam melaksanakan Pemasarakatan P-4 bagi warga masyarakatnya sendiri.

B. Latar Belakang Kelurahan Sawunggaling sebagai Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan

1. Keterjangkauan Masyarakat Sawunggaling oleh P-4

Sebagai kelurahan yang dicalonkan sebagai Pelaksana P-4 Teladan pada tahun 1989, Kelurahan Sawunggaling memiliki tanggung jawab untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat usia dewasa dengan P-4. Dalam menjangkau seluruh masyarakat, Penataran P-4 bukan merupakan satu-satunya metode dilakukan. Permainan Simulasi P-4 erupakan metode lain yang digunka untuk dapat menuntaskan seluh masyarakat Kelurahan Sawunggaling dengan P-4. Jumlah penduduk Kelurahan Sawunggaling seluruhnya pada tahun 1995 adalah 29.529 jiwa, denga jumlah total penduduk usia dewasa 17.515 jiwa. Masyarakat yang telah ditatar dengan P-4 baik dengan pola 17 jam, 25 jam, Penataran Tipe (ABC) ialah 12.412 orang. Penduduk yang telah terjangkau P-4 dengan Simulasi ialah sebanyak 3.945 orang. Total masyarakat yang telah terjangkau oleh -4 adalah 16.336 orang. Dengan demikian prosentase jumlah penduduk usia dewasa yang terjangkau Pemasarakatan P-4 ialah sesesar 93,43%.¹⁷

2. Efisiensi Kerja Perangkat Kelurahan Sawunggaling berdasar pada UU No.5 tahun 1979

Undang-Undang No.5 Tahun 1979 ialah Undang-Undang tentang Pemerintah Desa. Dalm Undang- Undang tersebut terdapat ketentuan-ketaantuan umum untuk dapat

¹⁶ Data Hasil Pemasarakatan P-4 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya, ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sawunggaling Bulan Maret 1996.

¹⁷ Data Usulan Desa/Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan yang diperbarui Tahun 1995/1996 Kelurahan Sawunggaling Kotamadya Surabaya

mennjalankan sistem pemerintahan di desa yang meliputi syarat seorang pemimpin desa serta kinerja pemerintahan desa. Sawunggaling merupakan kelurahan yang memiliki pemimpin pilihna dari Waikotamadya Surabaya. Lurah Kelurahan Sawunggaling ada tahun 1996 berpendidikan SLTA dan mayoritas perangkat kelurahan / kaur berpendidikan tinglat SLTA.¹⁸ Dengan demikian seluruh perangkat Kelurahan Sawunggaling merupakan seseorang yang berpendidikan. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa Kelurahan Sawunggaling memiliki perangkat kelurahan yang kompeten.

Keaktifan kegiatan lembaga di Kelurahan Sawunggaling merupakan salah satu syarat menjadi Pelaksana P-4 Teladan. Lembaga Musyawarah Daerah (LMD) dan Musyawarah Kelurahan serta Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam satu tahun dilaksanakan sebanyak 12 kali. Setap bulan lembaga-lembaga tersebut rutin mengadakan musyawarah. Dalam hal ini pihak yang diberikan tanggung jawab untuk menangani Pemasarakatan P-4 adalah RW serta PKK. Kedua pihak tersebut merupakan motor penggerak utama di keluraha Sawunggaling. Penataran P-4 yang terlaksana di Kelurahan Sawunggaling dapat berjalan dengan baik oleh karena semua unsur dalam kelurahan khususnya RW dan PKK bekerja dengan baik.

3. P-4 dalam Kehidupan Masyarakat di Kelurahan Sawunggaling

Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh Pelaksana P-4 Teladan. Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Permasyarakatan dan Nilai Keadilan harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pencerminkan tersebut dapat dilihat dari hubungan antar umat beragama di masyarakat yang terjalin dengan baik. Mayoritas masyarakat Sawunggaling yang beragama islam tetap menghargai dan menghormati kaum non muslim. Perselisihan antar umat beragama tidak pernah terjadi di kelurahan Sawunggaling. Begitu pula dengan kriminalitas di Kelurahan Sawunggaling yang tergolong jarang terjadi. Siskamling berjalan dengan baik sehingga keamanan kelurahan dapat terjaga. Kegiatan kerja bakti berjalan dengan baik dan rutin dilaksanakan setiap bulan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah proses Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling dilaksanakan bagi warga masyarakat yang mayoritas adalah anggota PKK serta Karang Taruna. Pelaksanaan Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling terlaksana dari tahun selama 15 tahun (1981-1996) dengan mengikuti aturan yang ditetapkan Walikotaamadya. Adapun aturan serta kebijakan yang ditetapkan juga dilaksanakan di seluruh kelurahan di Kotamadya Surabaya.

Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling memiliki proses yang berbeda dengan kelurahan kelurahan lain. Sebagai salah satu dari 4 kelurahan di Kotamadya

Surabaya yang ditetapkan sebagai Calon Pelaksana P-4 Teladan pada tahun 1989, kelurahan Sawunggaling merupakan kelurahan terbaik pada wilayah kerja pembantu Kotamadya Surabaya bagian Selatan. Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan merupakan kelurahan yang terpilih atas kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh Walikotaamadya. Pelaksanaan Pena taran P-4 di Kelurahan Sawunggaling pada periode awal (1981-1987) dan periode tengah (1987-1991) merupakan pelaksanaan penataran yang digencarkan masyarakat, terutama pada periode tengah. Hal ini dibuktikan dari pemilihan Kelurahan Sawunggaling sebagai Pelaksana P-4 Teladan yang disyaratkan dengan ketercapaian 90% peserta warga sudah terjangkau oleh P-4. Kesuksesan P-4, efektivitas perangkat kelurahan merupakan salah satu kriteria yang ditetapkan sebagai Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan. Hal tersebut merupakan salah satu indikator bahwa Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling terlaksana dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

Pada tahun 1996 secara tuntas Penataran P-4 di Kelurahan Sawunggaling dilaksanakan bagi seluruh masyarakat usia dewasa. Nilai-nilai P-4 tercermin dalam masyarakat, yakni tidak adanya konflik antar umat beragama sebagai salah satu bentuk pencerminan Nilai Ketuhanan. Kriteria lain yang terpenuhi sebagai Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan oleh Kelurahan Sawunggaling adalah berfungsinya LMD (Lembaga Musyawarah Desa) serta kerja bakti yang dapat dilaksanakan setiap bulan dengan rutin. P-4 merupakan program wajib yang diberlakukan oleh seluruh warga masyarakat usia dewasa di Indonesia. Lingkungan sosial masyarakat Kelurahan Sawunggaling yang mayoritas adalah PNS juga merupakan salah satu alasan mengapa masyarakat Sawunggaling tergolong sebagai masyarakat yang aktif dalam Pemasarakatan P-4. PNS memiliki kewajiban menjadi seorang panutan dalam masyarakat. Sosialisasi P-4 melalui tindakan yang harus tercermin dalam keseharian merupakan salah satu faktor yang pemicu keaktifan masyarakat dalam mengikuti Penataran P-4. Faktor lain adalah bahwa Kelurahan Sawunggaling terdiri dari masyarakat yang berstatus sebagai TNI AD yang bermarkas di Kodam V Brawijaya. Kedua profesi/status tersebut memiliki kewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, termasuk perihal kesuksesan P-4. Dengan demikian Kelurahan Sawunggaling adalah kelurahan yang layak terpilih sebagai Pelaksana P-4 Teladan di Kotamadya Surabaya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan bagi pemerintah adalah bahwa Penataran P-4 yang dilaksanakan pada masa Orde Baru dapat terlaksana dengan baik di masyarakat Kelurahan Sawunggaling. Pada dasarnya Pancasila penting untuk dapat dijadikan pedoman dan dihayati serta diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan metode dan cara yang lebih efisien tanpa adanya sebuah label kewajiban merupakan langkah yang baik agar Pancasila dapat dimasyarakatkan kembali bagi warga masyarakat Indonesia.

¹⁸ *Loc. Cit*

DAFTAR PUSTAKA**Sumber Buku:**

- Adi, Dhana. 2014. *Surabaya Punya Cerita*. Jogjakarta: Indie Book Coorner
- Basundoro, Purnawan. 2009. *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak
- CSIS. 1976. *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS
- Dahliman, A. 2010. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Dipoyudo, Kirdi. 1985. *Keadilan Sosial*. Jakarta: Rajawali
- Gotschalk, Louis. 1973. *Mengerti Sejarah : Pengantar Metode Sejarah*. Depok: UI Press
- Kasdi, Aminuddin. 2011. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press
- Ihrom. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mulyadi, Dedi. 2014. *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila*. Bandung: Refika Aditama
- Santoso, Topo, Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT Grafindo Raja Persada
- Siahaan, Hotman M. 1986. *Pengantar ke Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga
- Suriasumantri, Jujun S, dkk. 2002. *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Tayip, Adul Rouf dan Wicaksono. 1996. *Pedoman Penghayatan dan Pegamalan Pancasila (P-4) Suatu Tinjauan Singkat*. Surabaya: University Press IKIP Surabaya
- _____. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Surabaya: UNESA University Press
- _____. 1985. *Surabaya Dalam Angka 1984*. Surabaya: Kantor Statistik Kotamadya Surabaya
- _____. 1990. *Surabaya Dalam Angka 1989*. Surabaya: Kantor Statistik Kotamadya Surabaya
- _____. 1980. *Surabaya Dalam Lintas Pembangunan*. Surabaya: Sub Bagian Humas dan Protokol
- _____. 1993. *Mari Bermain Simulasi P-4 BP-7*. Surabaya: Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
- Wahjono, Padmo. 1993. *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sumber Koran:**
- Surabaya Post, 28 April 1984, *Warga Gandrung P4*, Halaman II
- Surabaya Post, 14 Januari 1983, *P4 Dimasyarakatkan Lewat Video*, Halaman II

- Memorandum, 4 Januari 1983, *Penataran P-4 perlu diikuti dengan 'pemukulan'*, Halaman I
- Surabaya Post, 18 Maret 1986, *Sebaiknya Penataran P-4 bagi Guru*, Halaman 6
- Surabaya Post, 13 Februari 1986, *Di Jatim Sudah 1,8 Juta Ikut Penataran P-4*, Halaman 2
- Surabaya Post, 4 Februari 1986, *Keberhasilan Kualitas Penataran P-4 Tak Akan Diteliti*, Halaman 1

Sumber Arsip:

- TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- Keppres RI No.10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- Kepmendagri No.239 tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat I dan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat I.I
- Inmendagri No.31 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Penataran P-4 di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, Kotamadya Daerah Tingkat II, Kotamadya, dan Kota Administratif.
- Inmendagri No.9 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam di Wilayah Dati II Seluruh Indonesia
- Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.46 tahun 1980 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat I
- Keputusan Walikotamadya, Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No.258 tahun 1981 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat II Surabaya.
- Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No.10059 Tahun 1989 tentang Pedoman Desa Pelaksana P-4 Teladan.
- Surat Edaran BP-7 Kotamadya Surabaya No.572 tahun 1986 tentang Foto-foto Kegiatan BP-7 dalam Pemasarakatan P-4
- Surat Edaran BP-7 Kotamadya Surabaya No.244 Tahun 1988 tentang Jawaban Pertanyaan Sub.Bidang Sukses Pemasarakatan P-4
- Surat Edaran Walikotamadya Surabaya No.065/XXX/402.6.02/1989 Tahun 1989 tentang Desa Pelaksana P-4 Teladan
- Surat edaran Walikotamadya No. 951 Tahun 1991 tentang Upaya Peningkatan Pemasarakatan &Pembudayaan P-4 di Wilayah Kodya Dati II Surabaya

Surat Edaran Walikotamadya Surabaya No.2933 Tahun 1996 tentang Laporan Tuntas Garapan Pemasarakatan P-4 di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Laporan Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam Bagi PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, di RW III Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Tahun 1993

Laporan Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam Bagi PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Tahun 1989

Data Usulan Perbaruan Calon Desa/Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan Tahun 1995/1996 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo

Data Hasil Pemasarakatan P-4 s/d Maret 1996 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Dati II Surabaya

Sumber Wawancara:

Wawancara kepada Ibu Sumarni selaku Kader PKK tahun 1983 pada tanggal 20 April 2018

Wawancara kepada Bapak Ismail selaku Tokoh Masyarakat (Pegawai Negeri) tahun 1982 pada tanggal 01 Mei 2018

Wawancara kepada Bapak Suwito selaku Kader Karang Taruna pada tanggal 02 Mei 2018

Wawancara kepada Bapak Djoni Hendratno selaku Kepala Bidang Pendidikan BP-7 Tahun 1997 pada tanggal 27 April 2018

Wawancara kepada Ibu Rahayu Ningsih selaku Kader PKK tahun 1992 pada tanggal 25 April 2018

Wawancara kepada Bapak Bambang Hariyono selaku kader Karang Taruna tahun 1992 pada tanggal 18 April 2018

Wawancara kepada Ibu Nanik selaku masyarakat biasa pada tanggal 21 April 2018

Wawancara kepada Bapak Djaiz P. selaku Tokoh Masyarakat (Ketua RT) tahun 1991 pada tanggal 21 April 2018

Wawancara Kepada Ibu Tutik Indrawati selaku masyarakat biasa pada tanggal 23 April 2018

Wawancara kepada Bapak Gatot selaku anggota Karang Taruna tahun 1987 pada tanggal 23 April 2018

Wawancara kepada Bapak Suyono selaku Tokoh Masyarakat (Pegawai Negeri) pada tanggal 21 April 2018

Wawancara kepada Ibu Endang Djuliati selaku anggota Karang Taruna tahun 1989 pada tanggal 02 Mei 2018